



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 261/SEK/PL.07/7/2023
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Laporan Pengawasan dan
Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)
Semester I Tahun 2023

Jakarta, 3 Juli 2023

Yth. 1. Kepala Biro Perlengkapan;
2. Para Sekretaris Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama.

di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, Mahkamah Agung diminta untuk melakukan Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2023.

Mengingat pentingnya penyampaian laporan tersebut, seluruh satuan kerja Unit Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Wilayah/Pembantu Pengguna Barang Eselon I/Pengguna Barang melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN Semester I Tahun 2023 format xlsx yang dapat diunduh melalui alamat https://bit.ly/template_excel_wasdal2023. Adapun Satuan Kerja mengirimkan Laporan Wasdal Semester I secara berjenjang kepada Pengguna Barang dengan mengunggah *file* dalam format xlsx dan pdf melalui alamat https://bit.ly/wasdal_semester1_tahun_2023.

Batas waktu penyampaian laporan paling lambat sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Barang	7 Juli 2023
Pembantu Pengguna Barang - Wilayah	13 Juli 2023
Pembantu Pengguna Barang – Eselon I	16 Juli 2023
Pengguna Barang	19 Juli 2023

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Plh. Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Panitera Mahkamah Agung;
3. Kepala Badan Pengawasan;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

